

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara yang dibangun dalam keanekaragaman yang sangat besar. Keanekaragaman ini adalah berkah bagi bangsa Indonesia secara khusus menjadi kebanggaan tersendiri bagi penduduknya. Namun, keanekaragaman ini dapat saja menjadi ‘bumerang’ tersendiri karena jika tidak dapat dikelola dengan baik dapat mengakibatkan konflik yang dapat merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik berdasarkan perbedaan SARA yang berujung pada kekerasan fisik maupun psikis sudah sangat sering terjadi dalam bangsa ini. Bentrok yang berujung jatuhnya korban jiwa yang dilatar-belakangi perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan sudah menjadi kisah-kisah pilu dalam sejarah pra dan pasca kemerdekaan Indonesia. Hal ini terbukti ketika Aceh mengalami konflik yang berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1989 hingga 2005.

Konflik merupakan antitesisnya perdamaian, antara konflik dan perdamaian adalah dua hal yang sangat berlawanan. Konflik bisa terjadi dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja dan dalam situasi apa saja. Didalam buku *Peace Education*, Amy Ohlendorf (Zamroni, 2008), memberikan definisi tentang konflik yaitu hasil dari adanya perbedaan pandangan, penerimaan, dan nilai-nilai seseorang ataupun sekelompok orang. Dalam kondisi masyarakat yang homogen pun konflik dapat saja terjadi, apalagi dalam sebuah entitas politik yang heterogen baik suku bangsa, agama, adat-istiadat, dan sebagainya.

Aceh merupakan suatu daerah yang baru saja keluar dari “zona” konflik internal. Sejak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MOU) di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005 konflik aceh dapat diselesaikan. Dengan kesepakatan MOU di Helsinki tersebut, menghantarkan Aceh dari perang ke damai. Konflik internal lazimnya melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan yang akan dicapai apapun keadaannya dan pastinya

memiliki imbas konflik bagi masyarakat pada umumnya. Imbas konflik biasanya menimbulkan ketakutan, ketidaknyamanan, teror dan pembodohan, ketertinggalan secara sadar ataupun tanpa disadari telah menjadikan daerah konflik sebagai daerah yang tertinggal. Konflik yang berkepanjangan mengakibatkan korban jiwa, rumah dan lembaga pendidikan rusak, terbakar, kehilangan anggota keluarga, bahkan menjadi yatim piatu diusia anak-anak, trauma, antara kawan dan lawan menjadi samar, hilang rasa kepercayaan dan rusaknya silahurrahi.

Setelah perdamaian pemerintah Aceh dinilai masih menyisakan pekerjaan besar terkait solusi penyebab munculnya konflik, salah satunya adalah persoalan kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat Aceh tidak juga tercapai, masalah utamanya terletak pada komitmen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan yang pro-rakyat Aceh. Sementara itu, setelah hampir 12 tahun MoU Helsinki kebijakan yang dikeluarkan kebanyakan bersifat politis dan cenderung menguntungkan satu kelompok saja. Sebut saja, Peraturan Daerah di Aceh disebut dengan Qanun, lembaga Wali Nanggroe dan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Dua produk dari perlemen Aceh tersebut terkesan bersifat politis karena sesuai dengan keinginan kelompok mantan GAM dengan alih-alih keinginan rakyat, ternyata pengesahan sepihak dan pemaksaan kehendak para Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang telah mengesahkan Qanun Aceh tentang Lambang dan Bendera, telah mengubah keadaan politik di Aceh semakin rumit dan gontai. Benih-benih kebencian pun mulai timbul kembali dikalangan masyarakat awam pedesaan, seolah-olah Pemerintah pusat telah melanggar MoU Helsinki. Semua ini akibat adanya pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh kalangan tertentu untuk mengantisipasi akan adanya penolakan Qanun tersebut oleh Mendagri dan Pemerintah Pusat (<http://www.kompasiana.com>, 24 Juni 2015).

Selama konflik di Aceh, tercatat ribuan orang terbunuh, ribuan lainnya hilang dan dilaporkan menjadi korban penyiksaan. Yang menyedihkan diantara angka itu, banyak diantaranya adalah perempuan. Dan ada seratus perempuan yang dilaporkan menjadi korban perkosaan. Berdasarkan sumber Komisi Nasional Anti Kekerasan Aceh, selama 1998- 2000 mencatat 56 perempuan di tembak, 15 orang hilang, 26 dianiaya, 20 diperkosa dan 40 lainnya diserang secara seksual.

**Dhian Mutia, 2018**

*PENDIDIKAN PERDAMAIAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN KORBAN KONFLIK ACEH*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Perdamaian di Aceh tidak cukup sebatas penandatanganan *Momerandum of Understanding* (MoU), tetapi lebih dari itu perlu adanya faktor-faktor pendukung agar ia dapat langgeng dan menjauhi sedapat mungkin hal yang dapat menggiring masyarakat ke kancan konflik. Ada empat krisis yang secara umum dapat mengganggu perdamaian itu yaitu ekonomi, politik, militer, budaya dan pendidikan. Ketika situasi masyarakat yang penuh dengan kekacauan, konflik dan tidak ada perdamaian, maka pendidikan dipandang sebagai salah satu pihak yang ikut berdosa karena gagal mewujudkan warga negara yang baik (Darmansjah, 2013). Pendidikan digunakan sebagai pendekatan untuk mengurangi konflik dan kekerasan sesungguhnya sudah menjadi wacana terutama pendidikan perdamaian. Oleh karena itu, sebagai penawar kekishruhan, peran pendidikan perdamaian (*peace education*) dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung terciptanya perdamaian dalam masyarakat.

Salah satu hal terpenting dan yang sangat mendesak menyangkut satu negara atau satu ideologi namun merupakan keprihatinan semua orang di dunia, adalah pendidikan untuk perdamaian dan keadilan. Takdir dan masa depan umat manusia bergantung pada dua konsep ini: perdamaian dan keadilan. Perdamaian abadi merupakan modal dasar membangun untuk menggapai sebuah negeri yang makmur. Dengan begitu walaupun pendidikan perdamaian merupakan gerakan di level internasional namun pengaplikasiannya berada di level daerah-daerah konflik yang lebih kecil melihat perang yang ada saat ini lebih banyak merupakan perang komunal yang berada didalam negara. Seolah-olah melupakan kondisi sosial Indonesia yang rawan muncul konflik komunal baik vertikal maupun horizontal dikarenakan terdapat keanekaragaman cara pandang yang tidak dapat dikelola dengan baik, baik cara pandang yang berbeda antar kelompok atau cara pandang yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah yang mampu menyebabkan konflik terbuka yang menghasilkan kekerasan.

Pemicu konflik lainnya dapat disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya kesepahaman dari suatu negara terhadap negara lainnya, kurangnya pengetahuan kita mengenai apa yang orang lain pikirkan, rayakan dan lakukan untuk bersenang-senang dapat juga menyeret kita pada sebuah konflik.

**Dhian Mutia, 2018**

**PENDIDIKAN PERDAMAIAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN KORBAN KONFLIK ACEH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembukaan Konstitusi UNESCO (dalam Kartadinata 2015: 5) menyatakan bahwa “Karena peperangan dimulai dalam pikiran manusia, maka dalam pikiran manusia pemeliharaan perdamaian harus dibangun,” dan pembangunan pikiran manusia hanya bisa dilakukan melalui pendidikan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih bergulat untuk kemajuan ekonomi nasional yang merupakan fokus dari pembangunan negara. Menurut Hicks (dalam Kartadinata, 2015: 59) sebagai berikut:

Pendidikan Perdamaian merupakan kegiatan berantai dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam mengeksplorasi kedamaian itu sendiri, cara mengatasi berbagai kendala dalam menciptakan kedamaian baik secara individu ataupun dalam masyarakat, serta berupaya memecahkan konflik yang terjadi melalui cara-cara yang non-kekerasan.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pendidikan perdamaian merupakan sebuah kegiatan atau proses yang berkelanjutan untuk menciptakan kedamaian dimasyarakat, dalam arti perdamaian seharusnya masuk dan memotong rantai tersebut dengan upaya-upaya pengajaran keterampilan seperti negosiasi dan mediasi serta pendidikan nilai-nilai perdamaian yang mencakup penghormatan HAM dan sebagainya, sehingga akan membawa Indonesia kepada situasi yang lebih baik lagi.

Pendidikan terutama pendidikan perdamaian juga dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengikis dan meminimalisir gerakan ekstrime yang sekarang ini merambah ke kaum pemuda dan pemudi yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tentang toleransi dan saling menghormati. Hal ini disampaikan oleh Tony Blair Perdana Menteri Inggris dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada November 2014 (dalam Kartadinata 2015) yang mengatakan bahwa pendidikan sangatlah penting dalam menjaga perdamaian dunia. Berangkat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan damai merupakan gerakan internasional yang sungguh sangatlah penting dalam mewujudkan perdamaian dunia secara internasional walaupun pelaksanaannya ada didaerah terpencil disuatu negara sekalipun sehingga apabila gerakan ini dilakukan secara bersama-sama oleh semua negara, tentunya membawa kesempatan untuk mencapai perdamaian dunia lebih besar untuk terwujud.

Dalam tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), pada dasarnya PKn merupakan program pembelajaran yang mengandung keniscayaan bagi suatu negara sebagai wahana pendidikan yang sengaja dibangun untuk membina dan/atau mengembangkan karakter warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good*) dalam latar subsistem pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal (Winataputra, 2015). Lebih lanjut untuk menjadi warga negara yang cerdas dimana warga negara harus memiliki tiga dimensi kompetensi, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap atau watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) (Branson dan Quigley, 1998. Hlm 5).

Pendapat dari *National Center for Learning and Citizenship* memberikan pemahaman bahwa pengetahuan kewarganegaraan sebagai komponen pertama dari kompetensi kewarganegaraan untuk mengukur pengetahuan kewarganegaraan serta menilai pengetahuan sejarah dan perkembangan terbaru, seperti memahami struktur dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, selain itu memahami dan mengerti perkembangan isu yang menjadi perdebatan publik sehingga warga negara dapat melatih kemampuan berpikir kritisnya dalam menanggapi isu publik. Pengetahuan kewarganegaraan dibidang sosial masih sangat minim, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya kekerasan, kerusuhan dan konflik.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizen*) (Wahab dan Sapriya, 2011)., seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual maupun secara partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan negara, sehingga dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dapat menanggapi suatu persoalan dengan bijak tanpa kekerasan. Kondisi ini membutuhkan alternatif solusi yang mengikutsetakan semua komponen masyarakat melalui sebuah kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Bentuk kerjasama itu terjalin dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. Program *peace*

*education* yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan contoh sederhana bagaimana warga negara semestinya memberikan partisipasinya dalam bentuk kepedulian terhadap masalah sosial.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa perlu untuk membahas dan meneliti mengenai pembentukan pembinaan kompetensi kewarganegaraan melalui program pendidikan damai pada lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Penelitian ini penting dilakukan karena program pendidikan damai dapat dijadikan model alternatif yang akan membantu mereka untuk menjadi individu-individu yang terbebas dari dendam, mampu bersikap toleran, mencintai perdamaian dan menghindari kekerasan, serta untuk mencegah dan menanggulangi persoalan sosial tanpa menunggu peran pemerintah yang terbatas diwilayah perkotaan seperti Kota Banda Aceh sehingga kondisi perkotaan yang rawan konflik dapat terminimalisir dengan baik.

Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Pendidikan Perdamaian dalam Meningkatkan Kompetensi Kewarganegaraan Korban Konflik Aceh”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Input program pendidikan perdamaian di Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi guna meningkatkan kompetensi kewarganegaraan korban konflik Aceh?
2. Bagaimana proses berlangsungnya pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi guna meningkatkan kompetensi kewarganegaraan korban konflik Aceh?
3. Bagaimana hasil program pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan korban konflik Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian maka cara umum, penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang pendidikan perdamaian dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan korban konflik Aceh.

### 1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan tujuan umum diatas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis input program pendidikan perdamaian di Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi guna meningkatkan kompetensi kewarganegaraan korban konflik Aceh
2. Untuk mendeskripsikan proses berlangsungnya program pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi.
3. Untuk menggali lebih lanjut terkait dengan hasil program pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan korban konflik Aceh.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Segi Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta menjadi acuan peneliti selanjutnya untuk pengembangan rumpun keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis pendidikan perdamaian dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan yang akan menghasilkan kerangka dasar secara konseptual tentang kompetensi kewarganegaraan melalui pendidikan perdamaian.

### 1.4.2 Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dari pemerintah untuk penerapan kebijakan serta aksi nyata terkait dengan program pendidikan perdamaian, yang juga oleh peneliti diharapkan dapat diadopsi oleh daerah lain yang pernah mengalami konflik guna menjaga keberlangsungan perdamaian.

### 1.4.3 Segi Praktik

Secara praktik, manfaat penelitian ini adalah;

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur yang bermanfaat bagi bahan kajian pengembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan kompetensi warga negara melalui pendidikan perdamaian.
- c. Memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa pendidikan perdamaian sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupannya, khususnya daerah yang pernah mengalami konflik.

### 1.4.4 Segi Isu dan Aksi Sosial

Secara isu dan aksi sosial penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran baik bagi pemerintah maupun aktor non pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan perdamaian yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya korban konflik, sehingga pemerintah tidak hanya terfokus memperhatikan pembangunan infrastruktur pembangunan saja, tetapi juga memperhatikan rekonsiliasi terhadap korban konflik guna menjaga perdamaian yang berkelanjutan.

## 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan sistematika penulisan karya ilmiah tesis agar alur penelitian lebih mudah di pahami dan jelas yang terdiri dari lima bab;

Bab *pertama* yaitu pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi dari tesis.

Bab *kedua* yaitu kajian pustaka yang berisikan tentang kajian teori mengenai pendidikan perdamaian dan kompetensi kewarganegaraan. Penelitian terdahulu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kajian yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam tesis.

**Dhian Mutia, 2018**

**PENDIDIKAN PERDAMAIAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN KORBAN KONFLIK ACEH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Bab *ketiga* yaitu metode penelitian berisikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, proses analisis data dan validitas data.

Bab *keempat* yaitu temuan dan pembahasan penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Bagian pembahasan berisi diskusi tentang temuan tersebut dikaitkan dan dibandingkan dengan teori yang terdapat pada bab dua. Pembahasan merupakan refleksi terhadap teori yang di kembangkan oleh peneliti atau peneliti sebelumnya.

Bab *kelima* yaitu berisikan simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

